



**SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENDATAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI WILAYAH PESISIR/NELAYAN

**DISAMPAIKAN OLEH :
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)**

JAKARTA, MARET 2011

SUMBER INFORMASI KEMISKINAN

- Proporsi Kemiskinan



SUSENAS
(SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

- Rumah Tangga Sasaran



PSE 2005
(PENDATAAN SOSIAL EKONOMI)

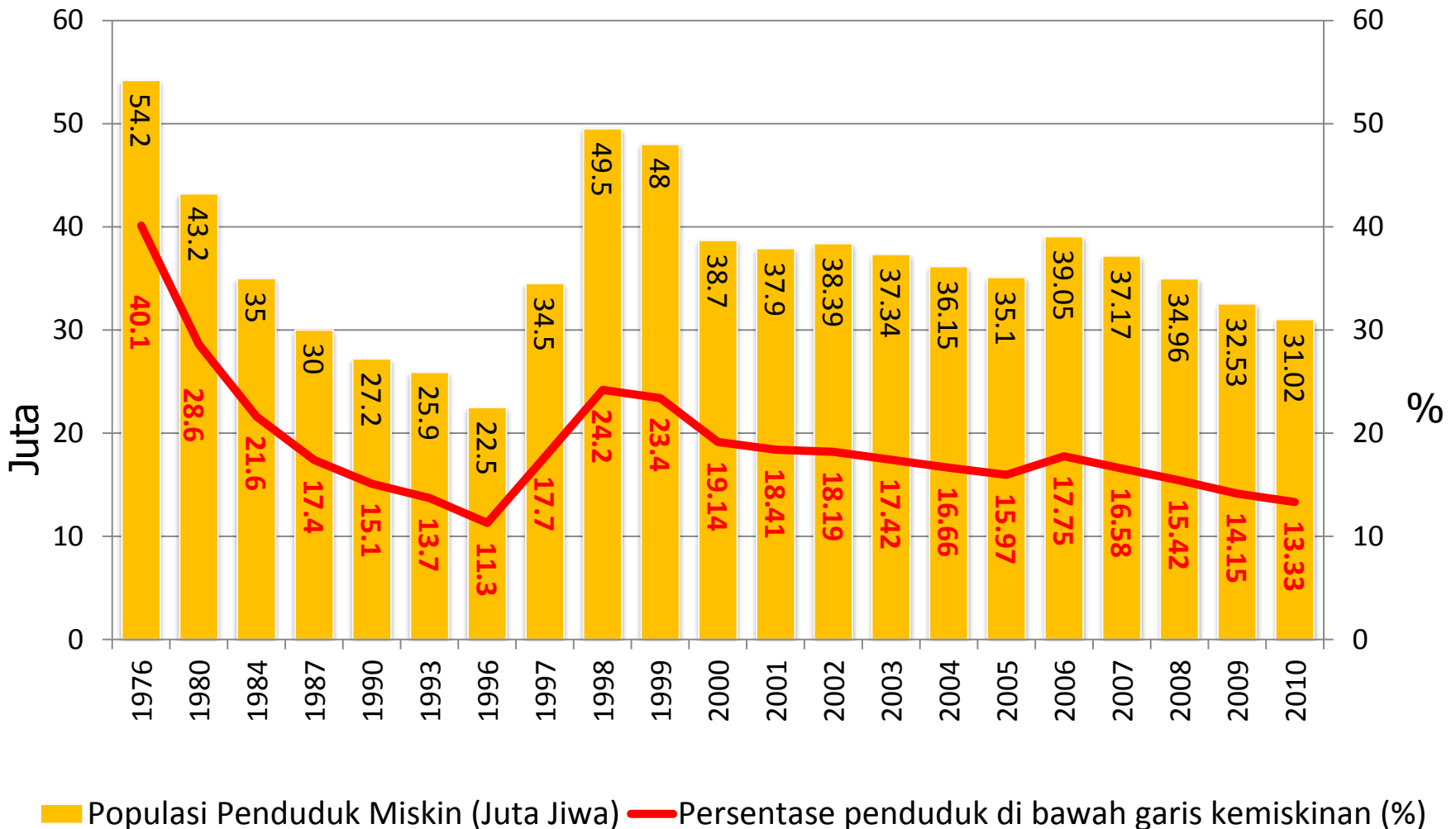


PPLS 2008
(PENDATAAN PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL)



PPLS 2011

PERKEMBANGAN POPULASI DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN



Sumber: Susenas

RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN 2008

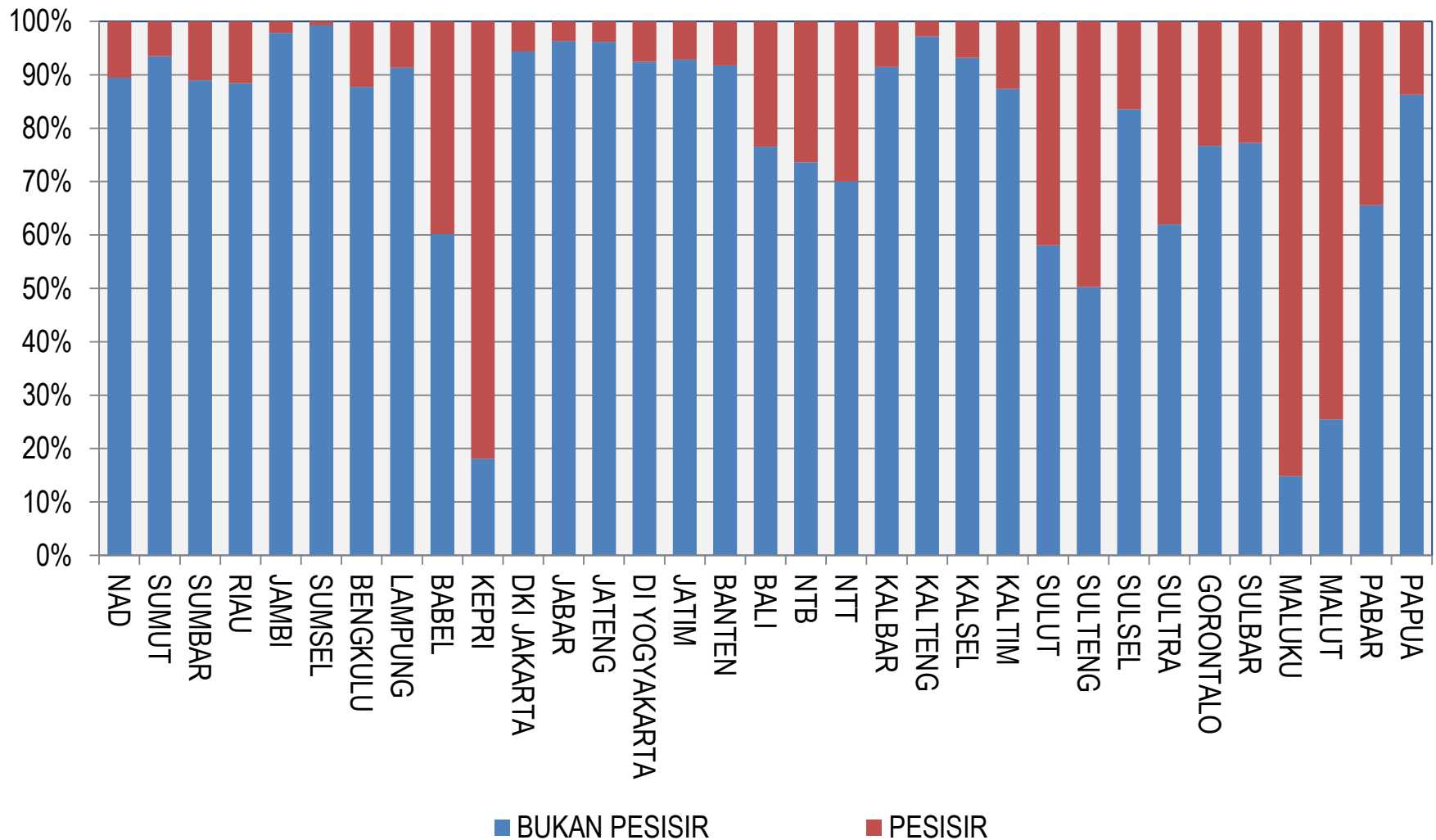
	Miskin	%	Dekat Miskin	%
Orang (Juta)	34,96	15,42	70	30,87
Rumah Tangga (Juta)	8,74	-	17,5	-
Garis Kemiskinan	Rp. 182.636		Rp. 219.163	

Source: Susenas dan PPLS, 2008

RUMAH TANGGA NELAYAN - MISKIN



STATUS DESA BERDASARKAN PESISIR DAN BUKAN PESISIR MENURUT PROVINSI



Sumber: PODES, 2008

JUMLAH RTS DAN PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI

Jumlah RTS Menurut Propinsi, Kategori Kemiskinan dan Wilayah

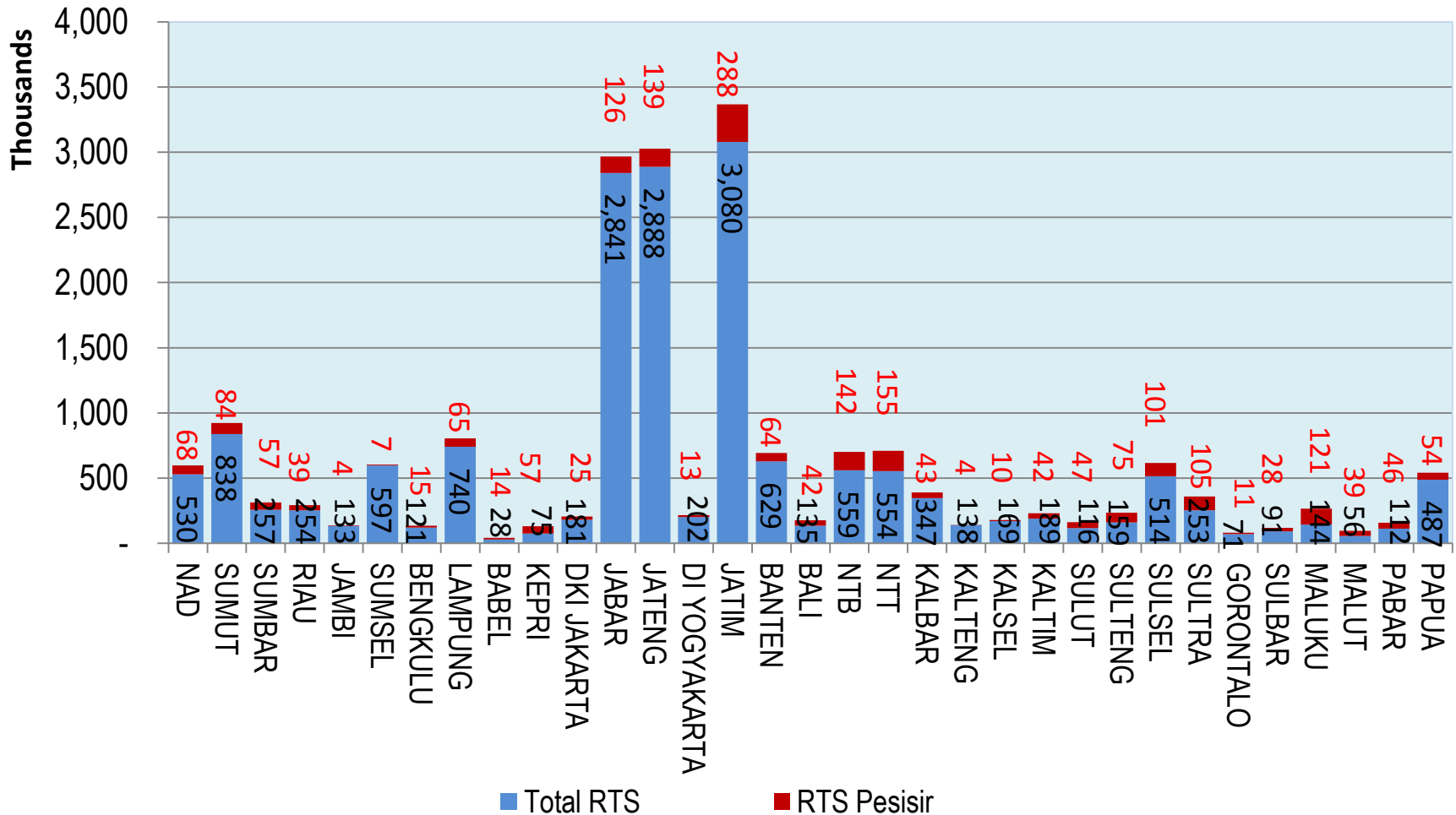
	TOTAL RTS				RTS PESISIR			
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jumlah	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jumlah
NASIONAL	2.990.770	6.829.174	7.668.063	17.488.007	390.216	849.674	892.262	2.132.152

Jumlah Penduduk Menurut Propinsi, Kategori Kemiskinan (RTS) dan Wilayah

	TOTAL PENDUDUK RTS				PENDUDUK RTS PESISIR			
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jumlah	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jumlah
NASIONAL	15.946.165	25.191.946	19.257.928	60.396.039	2.181.028	3.330.827	2.367.613	7.879.468

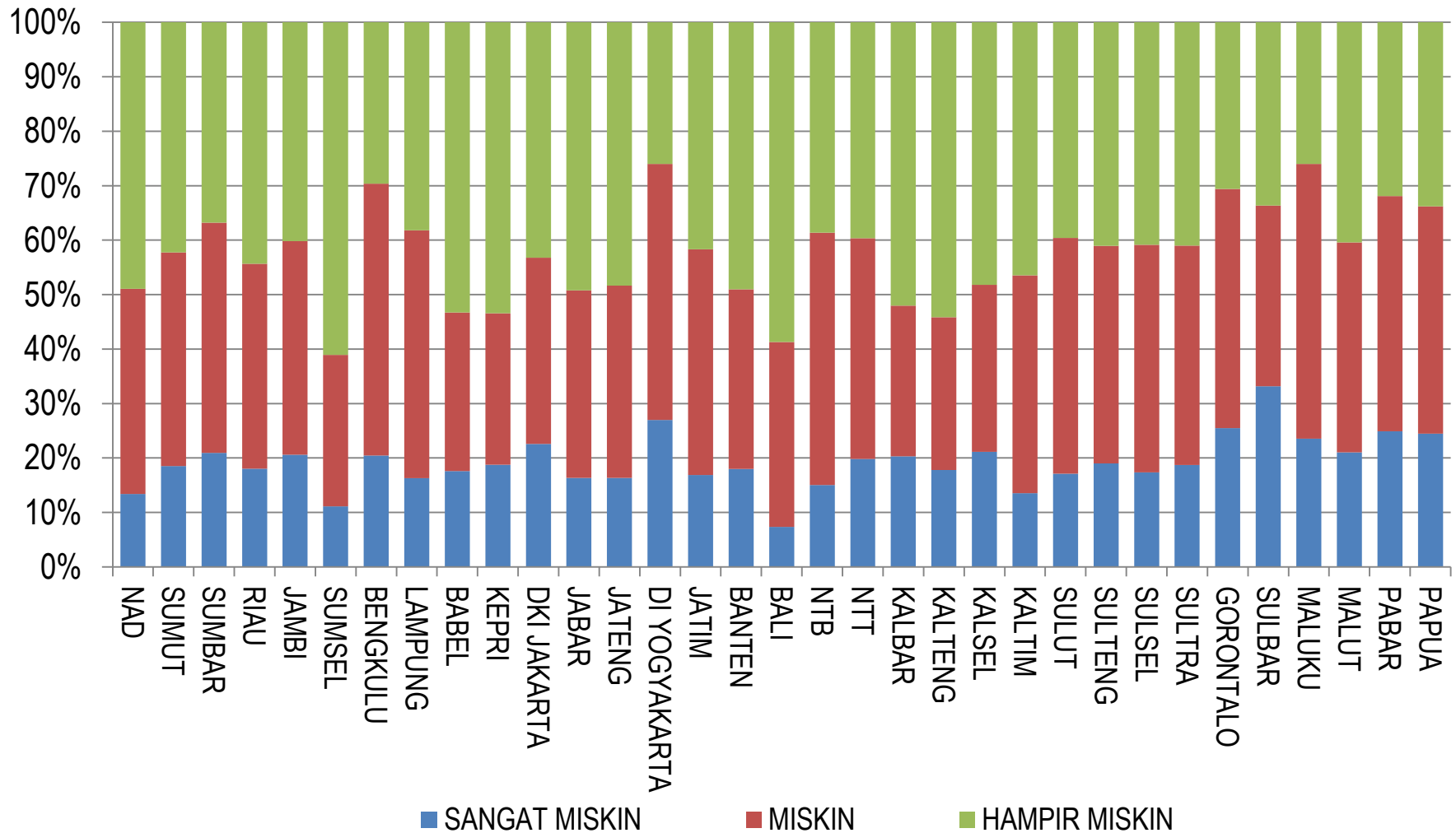
Sumber: PPLS, 2008

RUMAH TANGGA SASARAN DI WILAYAH NELAYAN/PESISIR DAN BUKAN WILAYAH NELAYAN/PESISIR MENURUT PROVINSI



Sumber: PPLS, 2008

RTS TINGGAL DI WILAYAH NELAYAN/PESISIR BERDASARKAN STATUS KEMISKINAN MENURUT PROVINSI



Sumber: PPLS, 2008

JUMLAH NELAYAN MENURUT PROPINSI, 2009

No.	Provinsi	JUMLAH NELAYAN			PERKIRAAN BURUH NELAYAN		
		LAUT	UMUM	JUMLAH	LAUT	UMUM	JUMLAH
1	NAD	78,131	2,560	80,691	42,215	380	42,596
2	Sumatera Utara	162,650	21,014	183,664	101,881	4,687	106,568
3	Sumatera Barat	36,453	10,287	46,740	22,028	2,673	24,701
4	Riau	40,056	22,335	62,391	14,124	2,955	17,079
5	Jambi	13,356	11,917	25,273	6,841	1,559	8,400
6	Sumatera Selatan	33,327	70,256	103,583	7,501	14,992	22,493
7	Bengkulu	15,929	3,562	19,491	5,932	1,219	7,151
8	Lampung	38,621	8,073	46,694	17,593	2,697	20,290
9	Kep. Bangka Belitung	73,165	0	73,165	24,764	0	24,764
10	Kepulauan Riau	95,563	0	95,563	23,854	0	23,854
11	DKI Jakarta	65,640	0	65,640	23,845	0	23,845
12	Jawa Barat	69,999	23,829	93,828	17,582	7,042	24,624
13	Jawa Tengah	95,409	29,372	124,781	52,362	6,854	59,216
14	DI Yogyakarta	2,337	2,523	4,860	0	0	0
15	Jawa Timur	278,980	33,179	312,159	124,796	7,024	131,820
16	Banten	21,973	998	22,971	14,964	219	15,183

Sumber:

- 1) DITJEN PERIKANAN TANGKAP (DATA JUMLAH NELAYAN)
- 2) BPS (PERKIRAAN BURUH NELAYAN BERDASARKAN HASIL SAKERNAS 2009)

JUMLAH NELAYAN MENURUT PROPINSI, 2009

No.	Provinsi	JUMLAH NELAYAN			PERKIRAAN BURUH NELAYAN		
		LAUT	UMUM	JUMLAH	LAUT	UMUM	JUMLAH
17	Bali	53,664	4,732	58,396	17,480	0	17,480
18	Nusa Tenggara Barat	64,128	3,442	67,570	13,002	1,571	14,573
19	Nusa Tenggara Timur	66,126	0	66,126	21,538	0	21,538
20	Kalimantan Barat	48,367	13,616	61,983	19,132	3,549	22,681
21	Kalimantan Tengah	26,430	33,276	59,706	5,959	7,942	13,901
22	Kalimantan Selatan	51,436	60,636	112,072	15,885	9,750	25,635
23	Kalimantan Timur	151,862	78,001	229,863	28,990	16,197	45,187
24	Sulawesi Utara	57,464	3,592	61,056	26,015	881	26,896
25	Sulawesi Tengah	84,389	749	85,138	20,749	0	20,749
26	Sulawesi Selatan	127,524	10,160	137,684	61,844	923	62,767
27	Sulawesi Tenggara	71,709	3,395	75,104	19,685	557	20,242
28	Gorontalo	23,244	1,249	24,493	5,977	240	6,217
29	Sulawesi Barat	33,698	0	33,698	19,454	0	19,454
30	Maluku	88,778	58	88,836	25,997	58	26,055
31	Maluku Utara	6,498	0	6,498	1,924	0	1,924
32	Irian Jaya Barat	34,742	0	34,742	6,523	0	6,523
33	Papua	57,631	19,877	77,508	10,554	6,314	16,868
INDONESIA		2,169,279	472,688	2,641,967	820,989	100,282	921,271
Persentase		82,11	17,89	100,00	31,07	3,80	34,87

Sumber:

1) DITJEN PERIKANAN TANGKAP (DATA JUMLAH NELAYAN)

2) BPS (PERKIRAAN BURUH NELAYAN BERDASARKAN HASIL SAKERNAS 2009)

KONSEP DEFINISI NELAYAN

NELAYAN adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya/tanaman air.

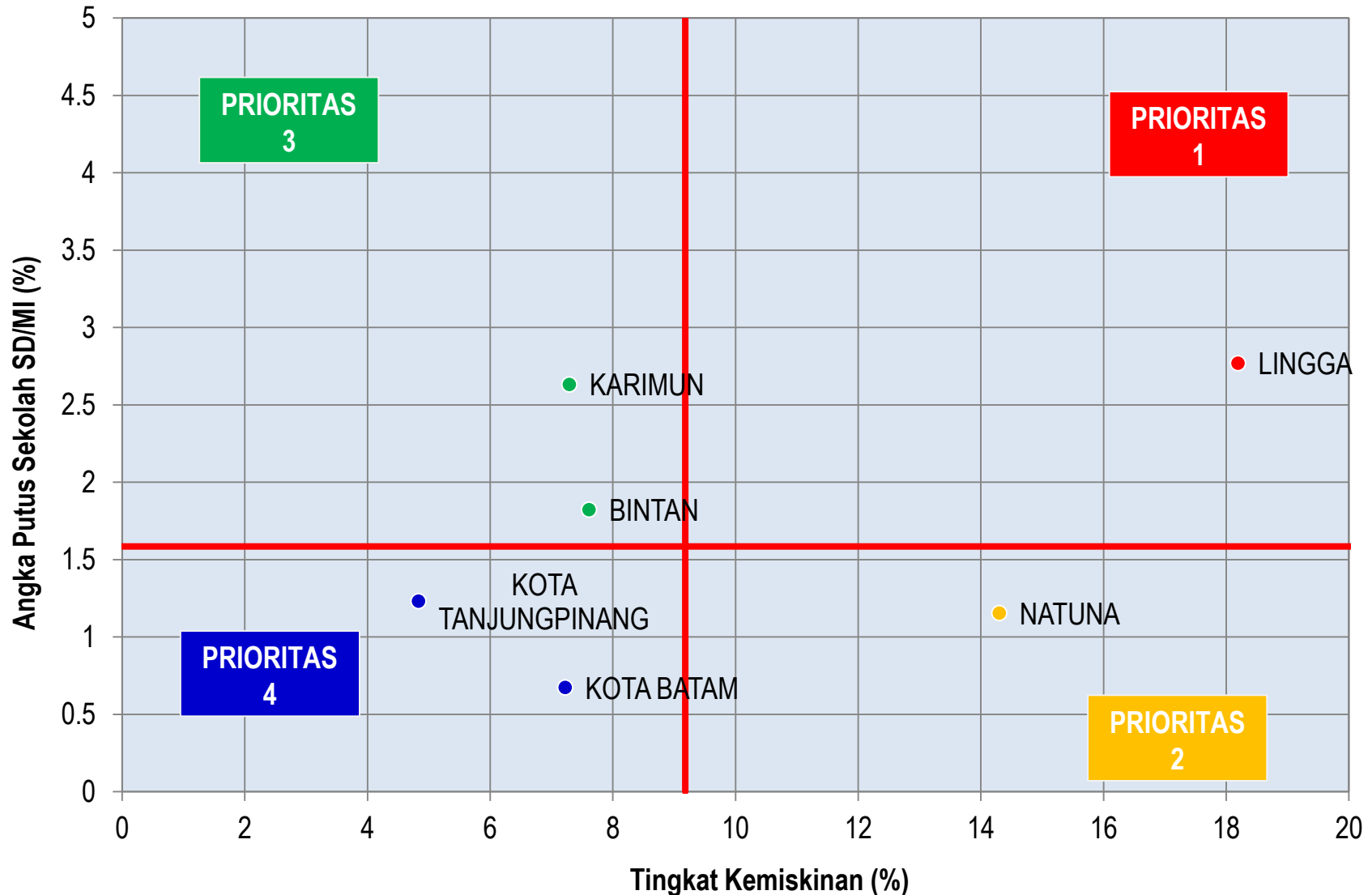
Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, **tidak dimasukkan** sebagai nelayan.

Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan **dimasukkan** sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan.

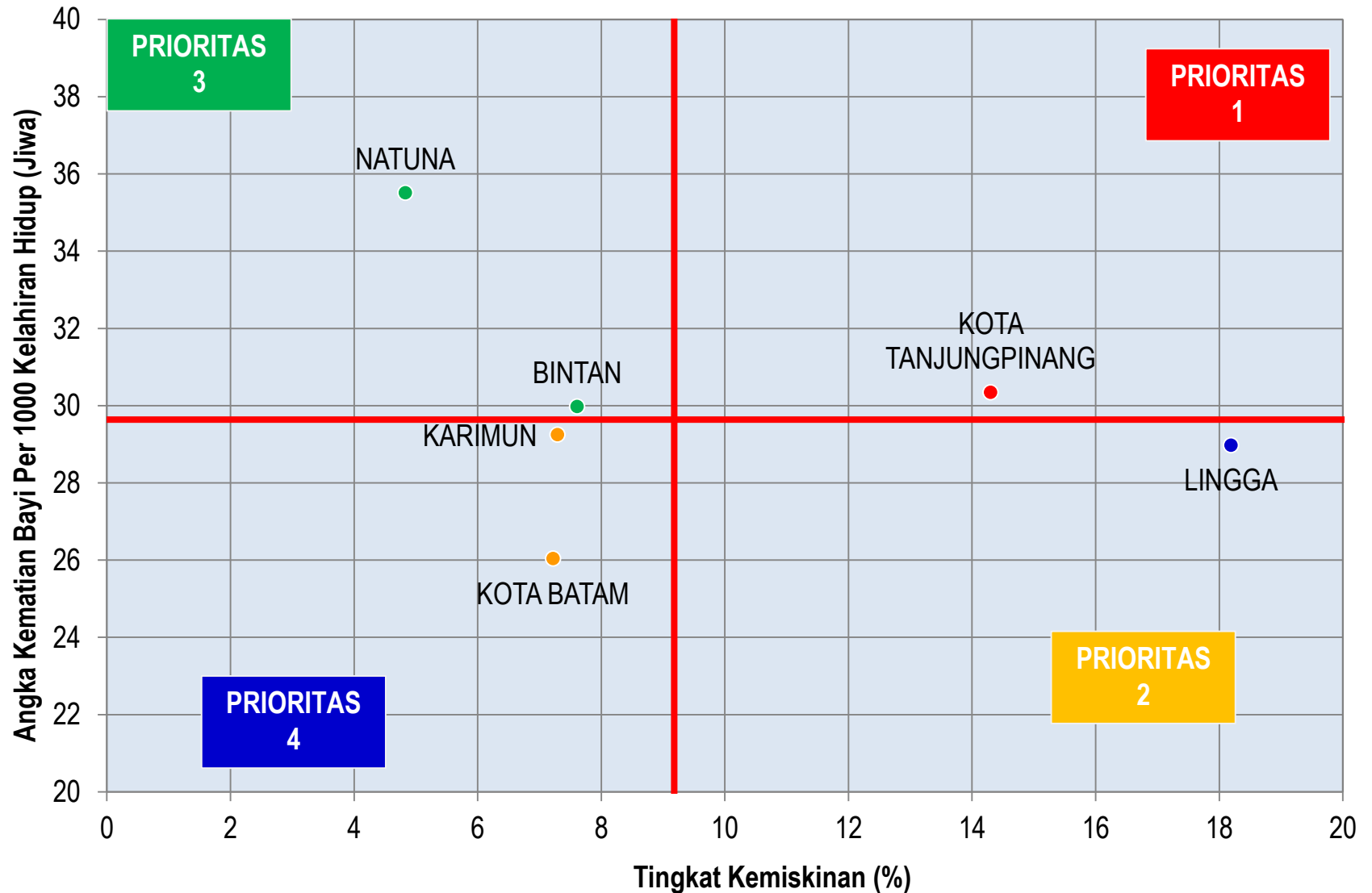
Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. **Nelayan penuh** yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air
2. **Nelayan sambilan utama** yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
3. **Nelayan sambilan tambahan** yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

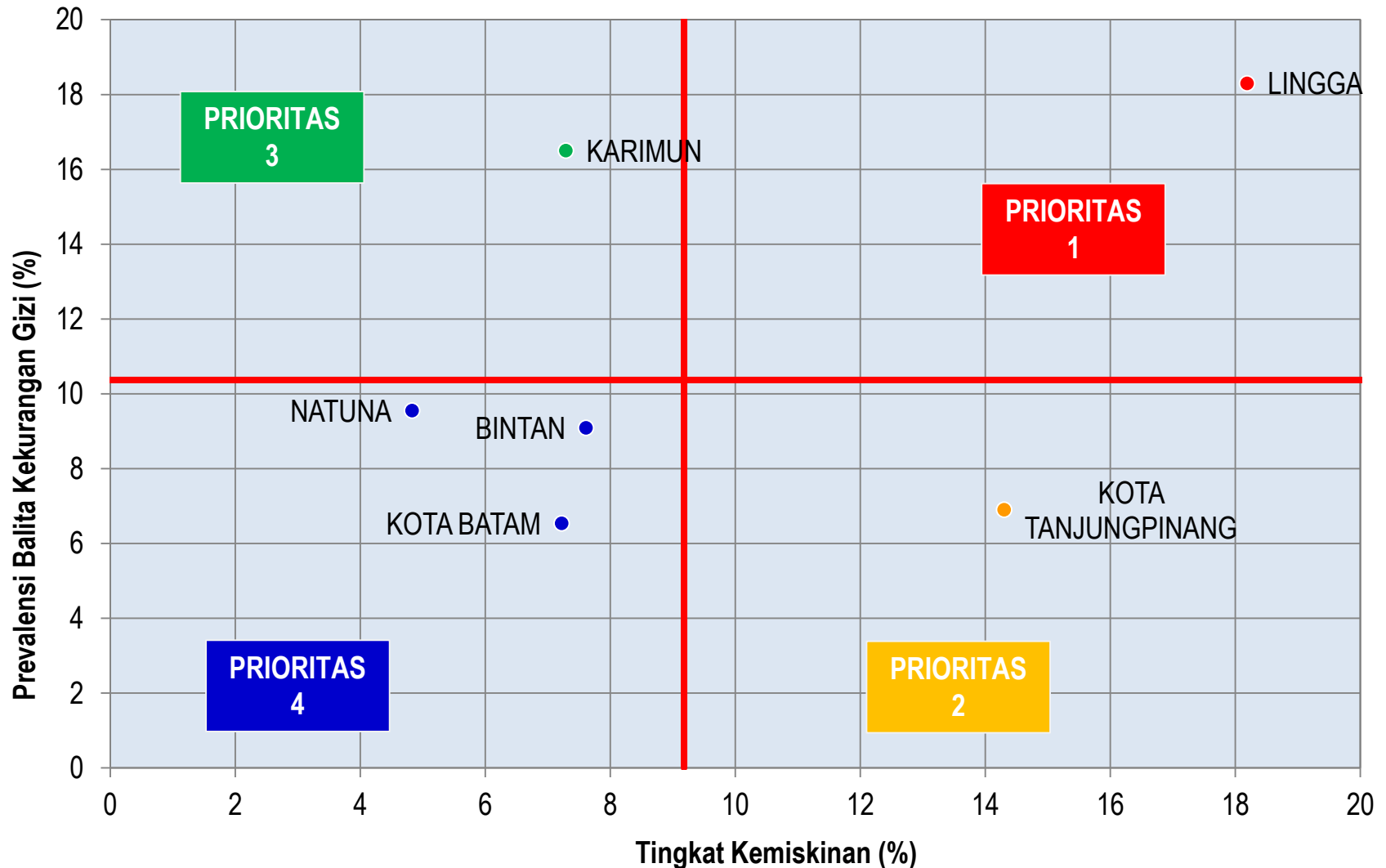
PRIORITAS INTERVENSI BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KEPRI: PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI



PRIORITAS INTERVENSI BIDANG KESEHATAN PROVINSI KEPRI: PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI



PRIORITAS INTERVENSI BIDANG KESEHATAN PROVINSI KEPRI: PREVALENSI BALITA KEKURANGAN GIZI



RELEVANSI PERLUNYA UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN

Terdapat Perbedaan Sistem Penargetan Berkaitan dengan Pemberian Jaminan Sosial:

- Perlu dibangun satu sistem penargetan yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.
 1. Data BLT (*Proxy Mean Testing*) → BPS
 2. Data Jamkesmas ("*Bottom Up*" atau "*Community Based*") → Kementerian Kesehatan

TUJUAN UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN:

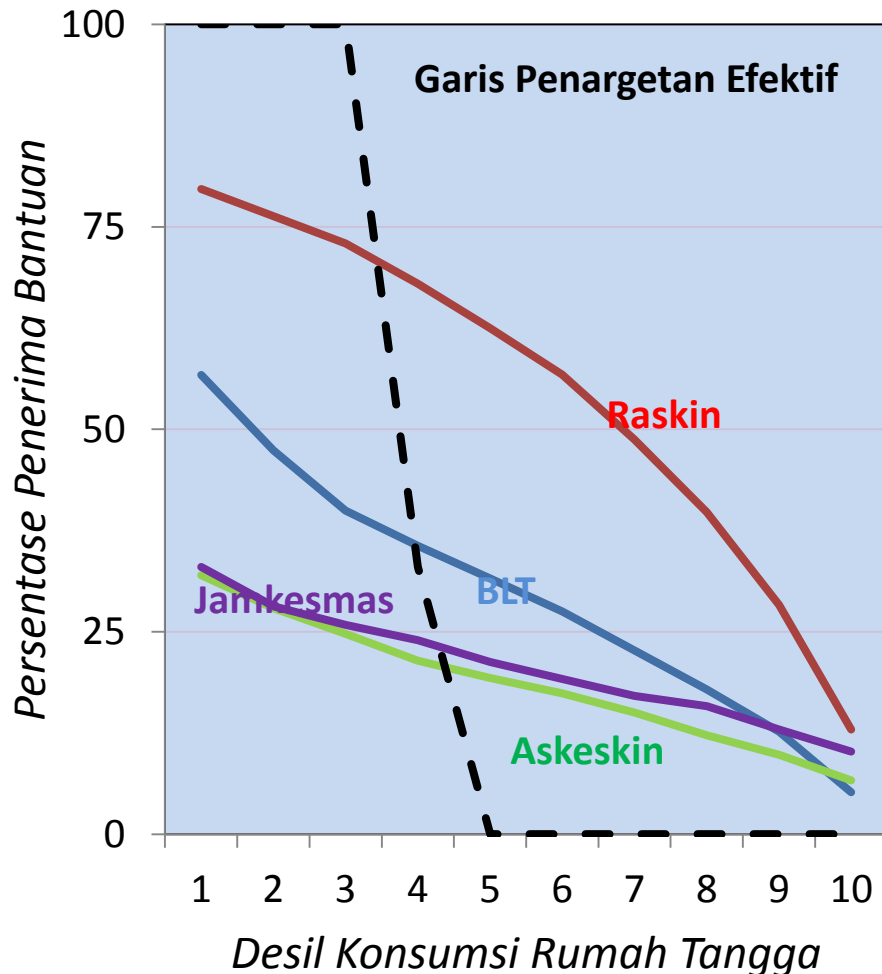
- Meningkatkan Akurasi Pendataan
- Menciptakan Sistem *Unified Database* yang Terpadu

PENARGETAN SASARAN PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Penargetan: memilih kelompok penerima bantuan sosial
- Efektif apabila dapat secara tepat **memasukkan yang miskin** dan **mengeluarkan yang tidak miskin**.
- Kriteria yang digunakan adalah **miskin** dan **tidak miskin**. Penggunaan kriteria **formal** dan **informal** dapat menyulitkan, formal dapat saja miskin, sebaliknya informal dapat tidak miskin.

	Miskin	Tidak Miskin
Menerima Bantuan		 <i>Inclusion Error</i>
Tidak Menerima Bantuan	 <i>Exclusion Error</i>	

EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAAT INI



Sumber: Susenas Diolah.

- Urutan *Exclusion Error*:
 1. ASKESKIN
 2. Jamkesmas
 3. BLT
 4. Raskin
- Urutan *Inclusion Error*:
 1. Raskin
 2. BLT
 3. Jamkesmas
 4. ASKESKIN

Keterangan:

Garis warna hitam adalah penargetan ideal. Semakin besar luas area di sebelah kiri garis ideal dan diatas garis penargetan semakin besar *exclusion error*. Semakin besar luas area di sebelah kanan garis ideal dan dibawah garis penargetan semakin besar *inclusion error*.

MENUJU PENARGETAN YANG EFEKTIF

Menyusun Basis Data Nasional

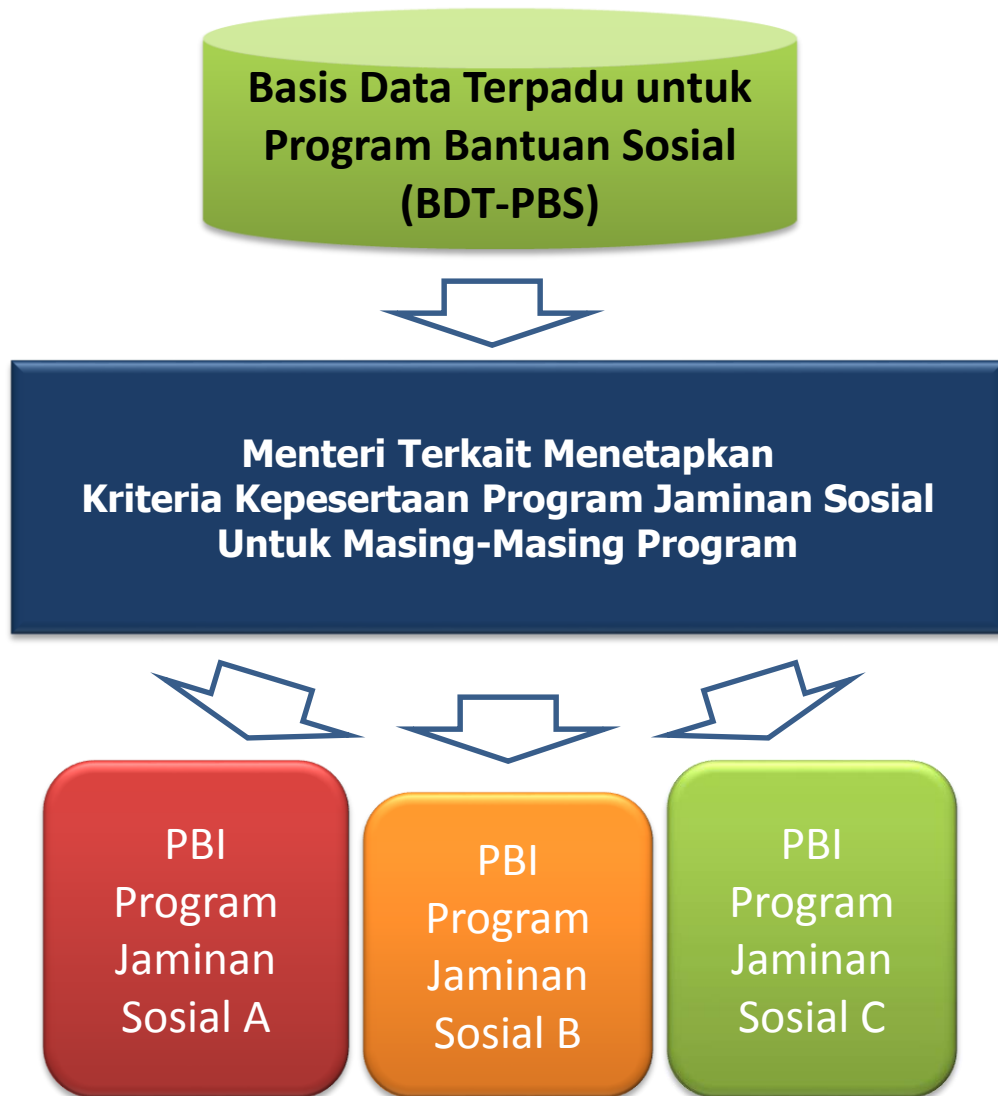


TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENARGETAN

KEUNTUNGAN BASIS DATA NASIONAL

- Standardisasi dalam proses pendataan – variabel, prosedur, dll. Sehingga menghindari duplikasi proses kerja.
- Tersedianya Basis Data Nasional bagi keperluan Program Jaminan Sosial maupun Bantuan Sosial.
- Penyelenggara Program mendapatkan karakteristik RT penerima secara komprehensif – bukan saja variabel yang penting untuk Program terkait.
- Kemudahan dalam proses penyesuaian dan pemutakhiran basis data.
- Potensi untuk menurun *exclusion* dan *inclusion* error dan untuk memastikan bahwa RT miskin mendapat semua program bantuan dan jaminan sosial yang harusnya mereka terima.

BASIS DATA NASIONAL DAN DATA PENERIMA PROGRAM JAMINAN SOSIAL



- BPS melakukan pendataan pada tahun 2011. Pendataan tersebut akan menghasilkan BASIS DATA TERPADU
- Program Bantuan Sosial selanjutnya menetapkan KRITERIA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL untuk masing-masing program
- Kriteria kelayakan ditetapkan oleh Menteri terkait
- Program mendapatkan DATA PESERTA PROGRAM yang ditarik (*extracted*) dari Basis Data Terpadu

PERENCANAAN PPLS11

- Dibandingkan dengan data PSE05 dan PPLS08 yang dikumpulkan oleh BPS tahun 2005 dan 2008 sebagai sumber data program bantuan dan jaminan sosial, diharapkan *exclusion & inclusion* error PPLS11 akan menurun karena akan ada banyak perbaikan, contoh:
 - Kuesioner akan lebih lengkap dan akan termasuk data yang diperlukan sebagai “eligibility kriteria” untuk semua program bantuan sosial
 - Metodologi akan diperbaiki supaya lebih banyak rumah tangga miskin akan disurvei
 - Sosialisasi akan lebih luas
 - Proses/formula proxy-means testing akan diupdate sesuai dengan kondisi dan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah

PROSES PENDATAAN MELALUI PPLS11

- Sedang dilakukan uji coba metode penargetan baru (community targeting, on-demand application, PMT) dan sudah diperoleh hasil dari eksperimen community targeting pada tahun 2009. Hasil dari studi ini akan memberi masukan kepada PPLS11.
- Pendataan (PPLS) yang dilakukan oleh BPS adalah proses pendataan dan bukan proses untuk menentukan penerima program → Basis data yang terbentuk akan berisi sejumlah RTS yang lebih besar dari sebelumnya. Basis data tersebut diharapkan berisi 30-40% penduduk berpenghasilan terendah (*30-40% terbawah dari penduduk berdasarkan distribusi konsumsi*).
- Proses PMT akan memakai basis data tersebut untuk mengidentifikasi 4 kategori dari distribusi konsumsi: sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan tidak miskin.
- Penerima program Bantuan dan Jaminan Sosial ditetapkan oleh masing-masing Program dengan mengacu kepada Kriteria Kepesertaan Program Bantuan Sosial, yang ditetapkan oleh Menteri penanggung jawab Program terkait.

TERIMA KASIH